

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia menuntut pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menitik beratkan pada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mengartikan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* diharapkan dapat mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar lembaga-lembaga pemerintahan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Kualitas laporan

keuangan dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta pengendalian dari pihak manajemen.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Adhi dan Suhardjo, 2013). Penerapan SAP harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Apabila informasi pada laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suharjo (2013), Azlim, dkk (2012), Pratiwi, dkk (2015), Nurani dan Sumiyati (2014), dan Nugraheni dan Subaweh (2008) bahwa penerapan SAP pada lembaga pemerintahan dapat menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas aparatur pemerintah merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Adhi dan Suhardjo, 2013). Pengelolaan keuangan yang baik harus memiliki aparat pemerintah yang berkualitas sehingga dalam penerapan standar akuntansi dapat dilakukan secara profesional. Kegagalan pada

sumber daya manusia di lembaga pemerintahan dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi akan berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan. Pernyataan tersebut sejalan penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) bahwa aparatur pemerintah yang berkualitas ialah aparat yang memahami dan memiliki kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) agar mampu menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan seras cita-cita bangsa dan Negara. Berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government* (Azlim, dkk, 2012). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sesuai dengan hasil penelitian dari Azlim, dkk (2012) bahwa pelaksanaan *good governance* harus dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur

Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintahan Kota Tual)” dengan perbedaan menambahkan satu variabel yaitu *Good Governance* dan studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pati. Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azlim, dkk (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.”**

1.2. Perumusan Masalah

Setiap lembaga-lembaga publik dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tidak terlepas dari penyusunan yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan SAP menunjukkan bahwa laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan professional dalam bidang akuntansi (keuangan).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- a. Apakah Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Pati?
- b. Apakah Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Pati?
- c. Apakah *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Pati?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diperjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh positif Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui pengaruh positif Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Pati.
- c. Untuk mengetahui pengaruh positif *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Pati.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Memberikan tambahan wacana dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah dan *good governance*.

3. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati

Memberikan masukan agar dapat menyajikan laporan keuangan secara berkualitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.